

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai vaksinasi terhadap masyarakat untuk meminimalisir terpapar covid-19 yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 yang dalam hal ini Peraturan Presiden tersebut mengatur sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi pihak yang menjadi sasaran penerima vaksin namun tidak mengikuti vaksinasi pada Pasal 13 ayat (4), namun kebijakan ini menuai polemik dikalangan masyarakat, dalam memikirkan hak jaminan sosial yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat (3). Jadi pemerintah tidak dapat serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial tersebut yang merupakan bentuk perlindungan sosial seluruh masyarakat Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dan pemberlakuan Pasal 13 A ayat (4) Perpres a quo sangat tidak mencerminkan kaidah hukum serta mengabaikan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sebagaimana yang telah tertuang dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan adanya pencabutan maupun penghapusan bantuan sosial terhadap masyrakat yang telah terdata sebagai penerima vaksinasi dan kemudian menolak untuk divaksin, maka hal ini tidak selaras dengan asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan serta asas kepastian hukum, dan adanya Pasal 13 A ayat (4) Perpres a quo secara subtansial mendegasikan hak warga negara dan hak asasi manusia pada urusan ekonomi dalam upaya memajukan, mensejahterakan, dan melanjutkan kehidupan yang layak. Bantuan sosial sesungguhnya menjadi mandat dan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945. Maka dalam hal ini, pertentangan dua norma menjadi konflik perundang-undangan yang secra verbatif memiliki perbedaan. Namun, mengingat keberadaan asas *lex superior derogate legi inferior* yakni aturan yang tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah, sehingga kedudukan perpres disini dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Kata Kunci : *Kebijakan, Jaminan Sosial, Penundaan*

ABSTRACT

The government issued a policy regarding vaccination of the public to minimize exposure to COVID-19, namely Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning the procurement of vaccines and the implementation of vaccinations in the context of dealing with the Covid-19 pandemic, in this case the Presidential Regulation. regulates administrative sanctions in the form of delays or termination of social security for parties who are targeted recipients of vaccines but do not participate in vaccinations in Article 13 paragraph (4), but this policy has drawn polemics among the public, in thinking about social security rights as enshrined in the Constitution Article 28H paragraph (3). So the government cannot immediately postpone or terminate the social security which is a form of social protection for all Indonesian people.

The research method used in this research is normative research with a statute approach.

The results of this study indicate that the existence and enforcement of Article 13 A paragraph (4) of the Presidential Regulation a quo does not reflect the rule of law and ignores democratic governance as stated in the general principles of good governance. With the revocation or elimination of social assistance for people who have been registered as recipients of vaccination and then refuse to be vaccinated, this is not in line with the principle of expediency, the principle of impartiality, the principle of accuracy and the principle of legal certainty, and the existence of Article 13 A paragraph (4) Perpres a quo substantially delegates the rights of citizens and human rights to economic affairs in an effort to promote, prosper, and continue a decent life. Social assistance is actually a constitutional mandate and mandate as stated in Article 28H paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. So in this case, the conflict of two norms becomes a verbatim conflict of laws that have differences. However, considering the existence of the principle of lex superior derogate legi inferior, namely high rules override lower rules, so the position of the presidential regulation here is considered to be contrary to the constitution.

Keywords: Policy, Social Security, Postponement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	1	
<i>ABSTRACT</i>	2	
DAFTAR ISI.....	3	
BAB I PENDAHULUAN	1	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	1	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penulisan.....	6	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian.....	7	Error! Bookmark not defined.
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	7	Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Kegunaan Praktis	7	Error! Bookmark not defined.
1.5 Keaslian Penelitian	7	Error! Bookmark not defined.
1.6 Metode Penelitian	9	Error! Bookmark not defined.
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9	Error! Bookmark not defined.
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10	Error! Bookmark not defined.
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	10	Error! Bookmark not defined.
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12	Error! Bookmark not defined.
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	12	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PERATURAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF ASAS ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK	14	Error! Bookmark not defined.
2. 1 Teori Perundang-Undangan	14	Error! Bookmark not defined.

2. 2	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ...	18	Error! Bookmark not defined.
2.2.1	Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik	20	Error! Bookmark not defined.
2.2.2	Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik	26	Error! Bookmark not defined.
2. 3	Teori Hak Asasi Manusia.....	28	Error! Bookmark not defined.
2. 4	Penafsiran Hukum.....	38	
BAB III	KEBERLAKUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PASAL 13A AYAT (4) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19	42	Error! Bookmark not defined.
3. 1	Keberlakuan Pasal 13A Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	42	Error! Bookmark not defined.
3.1.1.	Kedudukan Peraturan Presiden.....	43	
3.1.2.	Tinjauan Atas Asas-Asas.....	47	
3. 2	Peraturan Pemerintah “Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan (Covid-19) Ditinjau Dari Perlindungan Hukum Ekonomi Masyarakat”	52	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	PENUTUP.....	64	Error! Bookmark not defined.
4.1.	KESIMPULAN	64	Error! Bookmark not defined.
4.2.	SARAN	65	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA			